



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

2022

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
KATA PENGANTAR	4
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Isu-isu Strategis	6
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2022	15
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	62
3.3 Inovasi	62
3.4 Penghargaan	63
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rekomendasi	67
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang	9
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.5 : Sarana Dan Prasarana di Biro Hukum	10
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum	13
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2022	14
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Biro Hukum	15
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022	16
Tabel 2.5 : Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2022	17
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2022	21
Tabel 3.2 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Th.2022	23
Tabel 3.3 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya	24
Tabel 3.4 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah	25
Tabel 3.5 : Analisis Penyebab Keberhasilan	26
Tabel 3.6 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.7 : Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	28
Tabel 3.8 : Raperda Provinsi Jawa Tengah Yang Disusun	30
Tabel 3.9 : Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	30
Tabel 3.10 : Inventarisasi Pengkajian Produk Hukum Tahun 2022	32
Tabel 3.11 : Fasilitasi Penanganan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2022	48
Tabel 3.12 : Daftar Penanganan Perkara Oleh LBH di Jawa Tengah Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	50
Tabel 3.13 : Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Tahun 2022	51
Tabel 3.14 : Aduan Masyarakat Yang Difasilitasi Biro Hukum Tahun 2022	52
Tabel 3.15 : Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Biro Hukum	8
Gambar 2.1 : Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS	18
Gambar 2.2 : Aplikasi e-Budgeting	18
Gambar 2.3 : Aplikasi e-Controlling	18
Gambar 2.4 : Aplikasi e-RKO	19
Gambar 2.5 : Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum	19
Gambar 2.6 : Website JDIH Biro Hukum	19
Gambar 2.7 : Aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)	20
Gambar 2.8 : Aplikasi Pelita Jateng	20
Gambar 3.1 : Penerimaan Penghargaan Terbaik II JDIH Awards Tahun 2022	63
Gambar 3.2 : Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022	64
Gambar 3.3 : Piagam Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022	64

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2023
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

IWANUDDIN ISKANDAR, SH. MHum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Disamping itu juga masyarakat menuntut adanya supremasi hukum, terjaminnya kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil dan merata, penegakan keadilan yang obyektif dan manusiawi, produk hukum daerah yang melindungi kepentingan masyarakat, serta peningkatan kualitas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan hukum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk lembaga Biro Hukum di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang selalu

mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dapat teratasi.

Disamping itu pula diharapkan keberadaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung program visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Diantaranya adanya permasalahan yang perlu ditangani dengan belum optimalnya rekomendasi penyusunan kebijakan daerah dan belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten/Kota.

1.2 Isu-isu Strategis

Terdapat berbagai permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui upaya mewujudkan pelayanan di bidang hukum, antara lain :

1. Dalam penyusunan produk-produk hukum daerah dituntut untuk dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
2. Tuntutan terhadap supremasi hukum dan terjaminnya kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat masih kurang.
3. Tuntutan terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan merata, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) yang sedang terlibat dengan permasalahan hukum.
4. Masyarakat menuntut agar penegakan keadilan dapat bersifat obyektif dan manusiawi.
5. Masyarakat menuntut agar penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia semakin baik.

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu

pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum.
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Gambar 1.1.



1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada tahun 2022, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran sebagai berikut :

1. Susunan Pegawai

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Berdasarkan jabatan :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	-	-	-	5	7	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	-	1	5	10	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	5	6	11
Jumlah Total	1	-	1	15	23	40

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	2	10	-	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2	11	3	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	3	8	-	11
Jumlah Total	8	29	3	40

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana / D4	Sarjana Muda/D3	SLTA	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	3	9	-	-	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	5	8	1	2	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	2	8	1	-	11
Jumlah Total	11	25	2	2	40

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Perundang-undangan	8	4	12
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	11	5	16
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	4	7	11
Jumlah Total	24	16	40

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari :

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana di Biro Hukum SETDA

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	43 Unit	Baik
4.	Laptop	7 Unit	Baik
5.	Printer	41 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	<i>Airphone</i>	11 Unit	Baik
11.	Pesawat <i>Telephone</i>	2 Unit	Baik
12.	<i>Faximile</i>	2 Unit	Baik
13.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

3. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2022, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, dan Program Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp.3.284.951.000,-.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi

Dalam melaksanakan program pembangunan di Jawa Tengah Biro Hukum Sekretariat Daerah mendukung visi Gubernur Jawa Tengah yaitu **"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI, TETEP MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI"**.

2. Misi

Biro Hukum melaksanakan Misi Ke-2 dari misi Gubernur Jawa Tengah yaitu Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas jangkauan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Tujuan & Sasaran

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki tujuan yaitu : **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"** dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
- 2) meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
 - c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - d. Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Pencapaian Strategi dimaksud didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
- 2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah;
- 3. Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah;
- 4. Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan
- 5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 untuk Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah			Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
				Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79
		1.1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase efektifitas produk hukum daerah	91	92	93	95	96
				Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	91	92	93	95	96
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Biro Hukum	75	76	77	78	78,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2028-2023, Biro Hukum melaksanakan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan yaitu :

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85
				Persentase Kebijakan yang Efektif	Persen	80
		Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah		Persentase efektifitas produk hukum daerah	Persen	95
		1.1	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	Persen	95
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	Persen	95
				Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	Persen	95
				Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	Persen	95
				Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	95
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Nilai IKM Setda	Angka	78
				Nilai SAKIP Setda	Angka	73,77

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	78
		2.1	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	Persen	100

Tabel 2.3.
Sasaran, Startegis dan Arah Kebijakan Biro Hukum

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum.	1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah. 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah. 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretriati Daerah. 4) Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah. 5) Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
		Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota.	
		Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH.	
		Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum.	
		Optimalisasi pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	Persen	82
2.	Sasaran : 2.1. Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	95
	2.2. Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	Persen	95
	2.3. Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	Persen	95
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	Persen	95
	2.4. Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100

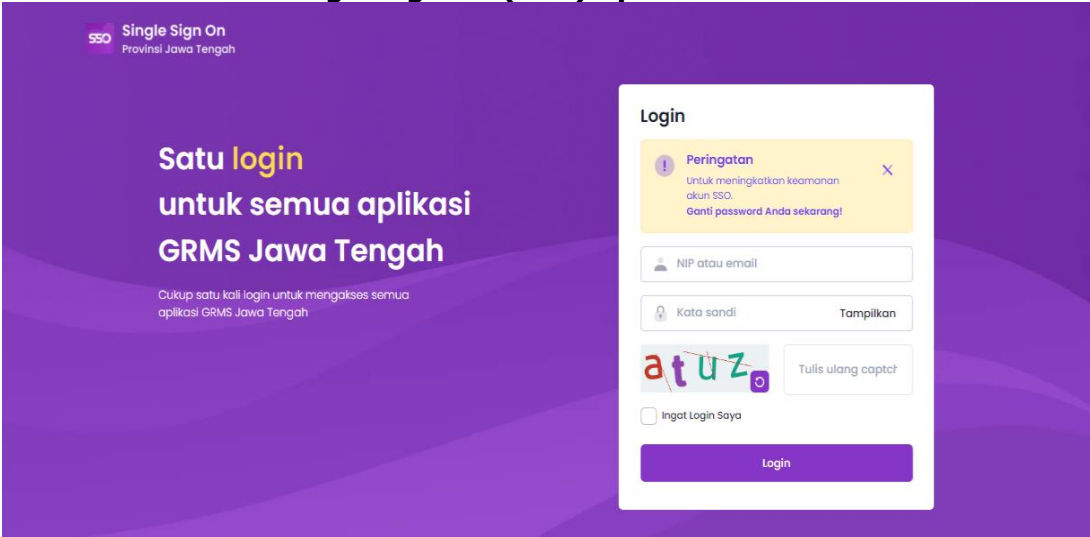
Tabel 2.5.
Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	95 %	2.403.244.000
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	95 %	
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum.	12 dokumen	1.488.244.000
	b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara.	12 dokumen	915.000.000
2.	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	100 %	881.707.000
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1 laporan	700.000.000
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum.	2 dokumen	181.707.000

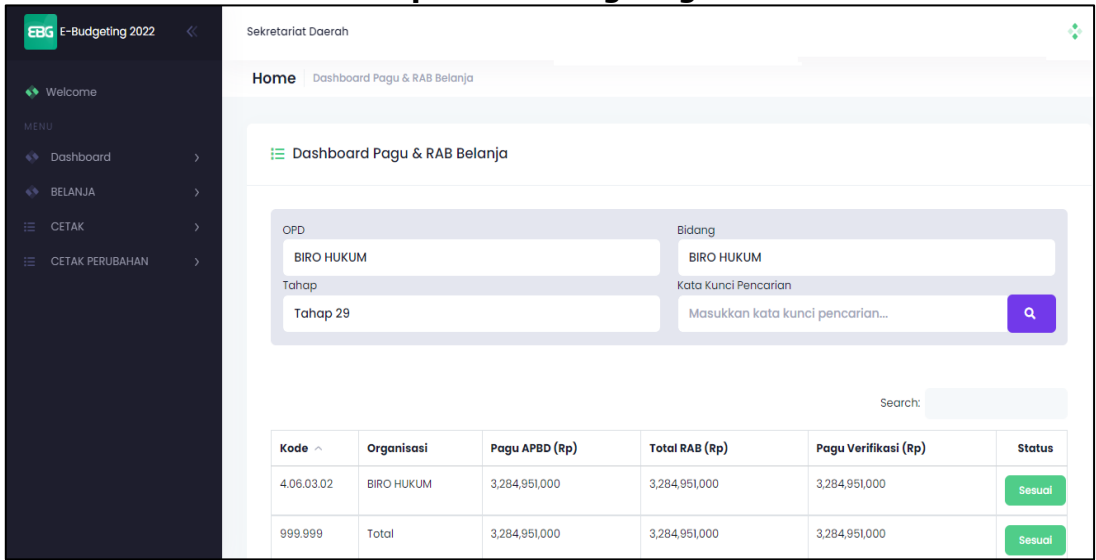
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Biro Hukum dalam melaksanakan capaian kinerja dan penerapan SAKIP di dukung dengan instrumen-instrumen, antara lain :

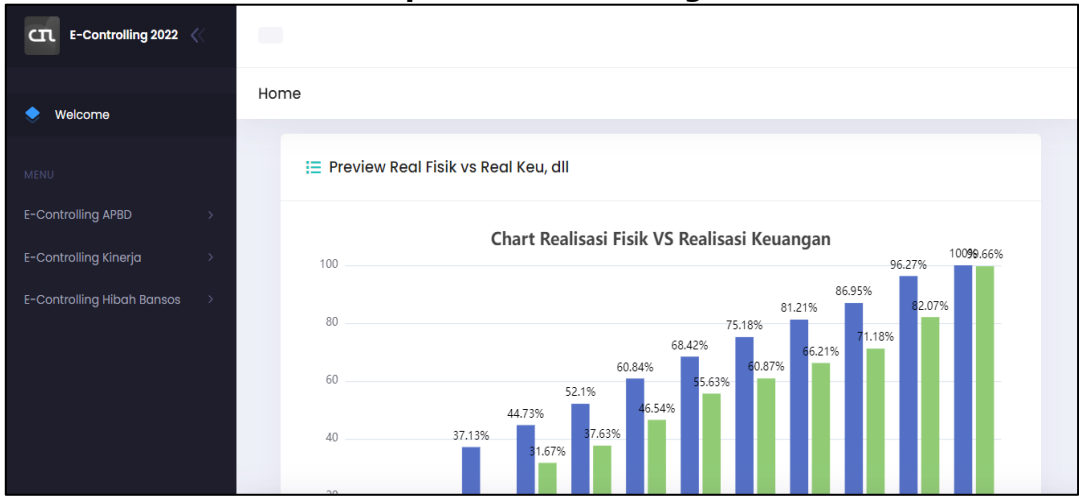
Gambar 2.1.
Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS



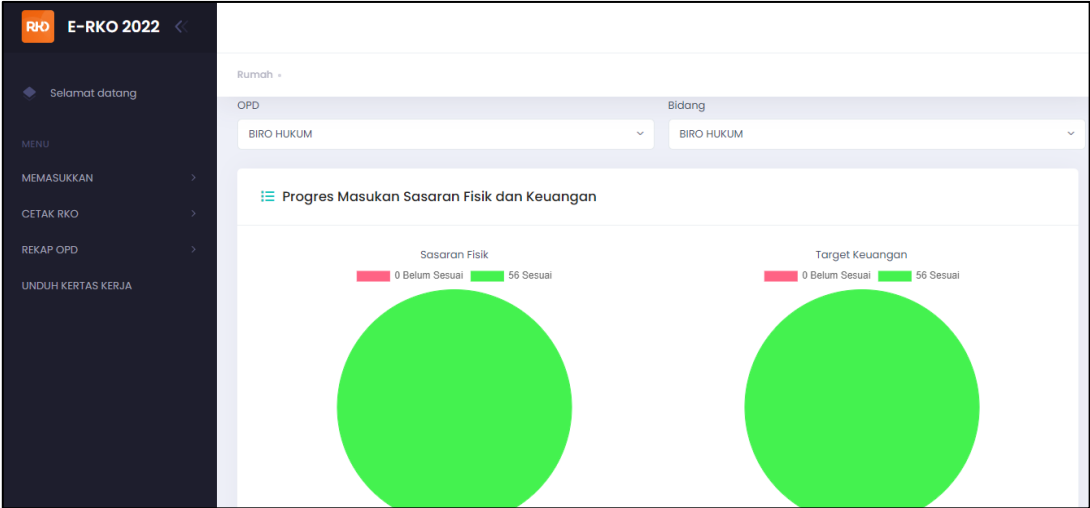
Gambar 2.2.
Aplikasi e-Budgeting



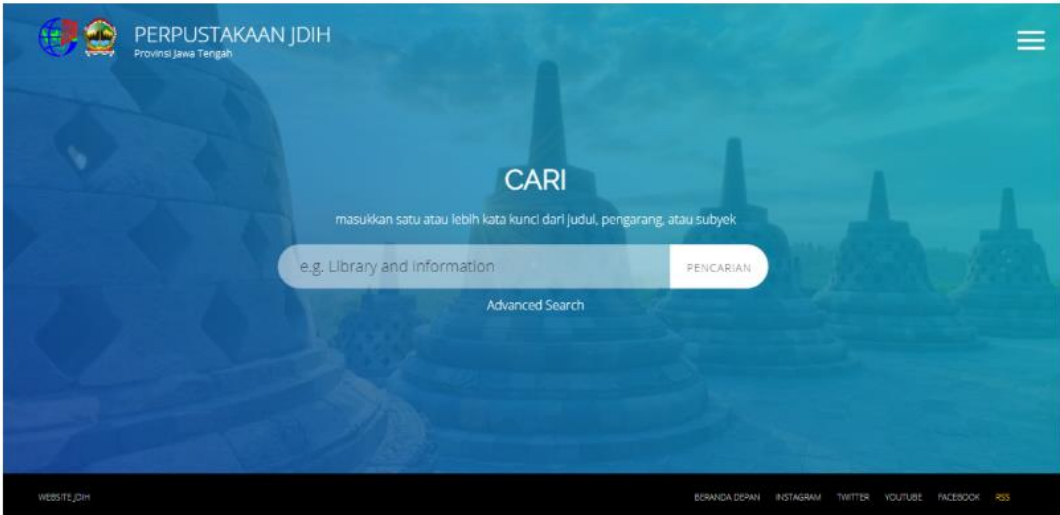
Gambar 2.3.
Aplikasi e-Controlling



Gambar 2.4.
Aplikasi e-RKO



Gambar 2.5.
Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum



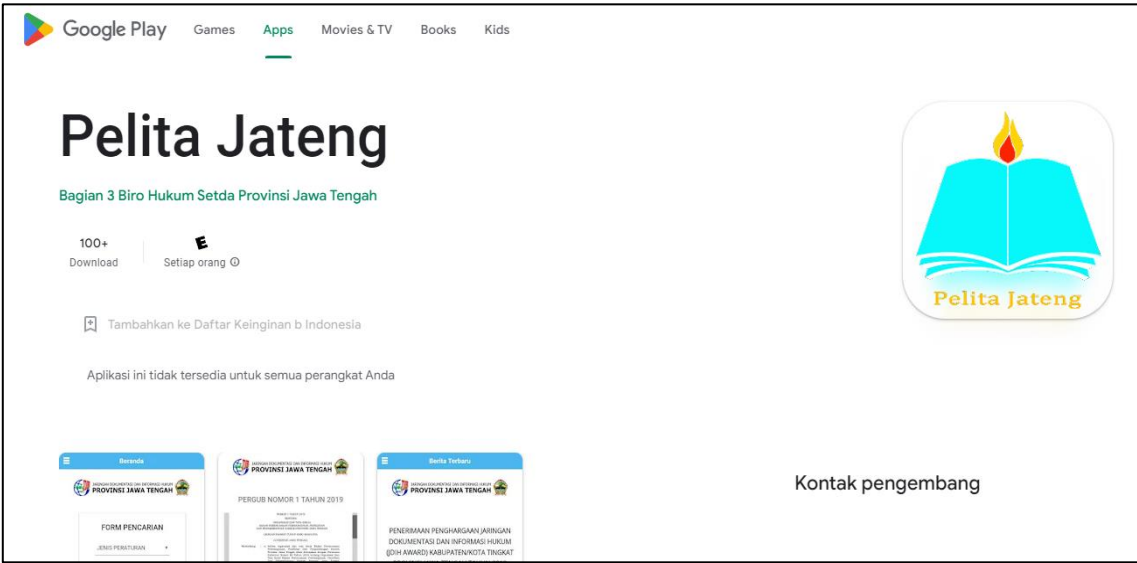
Gambar 2.6.
Website JDIH Biro Hukum



Gambar 2.7.
Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)



Gambar 2.8.
Aplikasi Pelita Jateng



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

Renja Tahun 2022, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Untuk mencapai tujuan tersebut Biro Hukum yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah. Berikut tabel capaian kinerja pada sasaran strategis tahun 2022 :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Reali sasi	Persen tase	
1	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	95	100	105%	94%
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabu- paten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	Persen	95	100	105%	94%
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	Persen	95	100	105%	94%
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	Persen	95	100	105%	94%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Realisasi	Persen tase	
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100	100	100%	100%

Biro Hukum melalui Program yaitu **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dengan alokasi anggaran Rp. 2.403.244.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.400.812.419,- (99,90%). Program ini terdistribusi kedalam 4 Sasaran Program dan 5 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%, persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%, persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%, dan persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%.

Pencapaian yang melebihi target karena dengan telah menurunnya Pandemi COVID-19 maka terjadi peningkatan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota selain itu adanya aplikasi layanan E-PHD Provinsi Jawa Tengah dan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah serta Pelita Jateng mempermudah pelaksanaan pengkajian, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien.

Selain itu melalui program yaitu **Program Administrasi Umum** dengan alokasi anggaran Rp. 881.707.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 872.818.000,- (98,99%). Menunjukkan bahwa persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum realisasinya mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Terhadap hasil kinerja tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	95%	100%	105%	Sangat Baik	Bagian Perundang-undangan
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	95%	100%	105%	Sangat Baik	Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	95%	100%	105%	Sangat Baik	Bagian Bantuan Hukum Dan HAM
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	95%	100%	105%	Sangat Baik	Bagian Bantuan Hukum Dan HAM
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Hukum capaian realisasinya dikategorikan **Sangat Baik**. Hal tersebut dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan seluruh realisasinya tercapai 100%.

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	93 %	100 %	108 %	94 %	100 %	106 %	95 %	100 %	105 %
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten / kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	93 %	100 %	108 %	94 %	100 %	106 %	95 %	100 %	105 %
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	93 %	100 %	108 %	94 %	100 %	106 %	95 %	100 %	105 %
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	93 %	100 %	108 %	94 %	100 %	106 %	95 %	100 %	105 %
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Hukum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	105%	96%	Tercapai
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	105%	96%	Tercapai
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	105%	96%	Tercapai
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	105%	96%	Tercapai
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Hukum Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata tercapai 100%. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator kinerja telah tercapai 100%.

Sedangkan analisis terhadap penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	95%	100%	105%	Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu.	-
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	95%	100%	105%	Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu.	-
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	95%	100%	105%	Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk.	-
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	95%	100%	105%	Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota	-
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Hukum Tahun 2022 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain Rancangan produk hukum

daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu, Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu, Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk, Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota, serta Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	95%	100 %	105 %	863.244.000	861.673.160	99,82	0,18
2	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	95%	100 %	105 %	625.000.000	624.481.559	99,92	0,08
3	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	95%	100 %	105 %	665.000.000	664.668.400	99,95	0.05
4	Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	95%	100 %	105 %	250.000.000	249.989.300	99,99	0,01

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
5	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	881.707.000	872.818.000	98,99	1,01

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dari anggaran Biro Hukum sebesar Rp.3.284.951.000,- capaian realisasi anggaran atas pencapaian 5 (lima) indikator program pada tahun 2022 sebesar Rp.3.273.630.419,- (99,66%) dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,34%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disampaikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	105	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 dokumen	Menunjang
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang	105	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum	12 dokumen	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		dievaluasi atau difasilitasi.			Daerah Kabupaten/ Kota		
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	105	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 dokumen	Menunjang
		Persentase kabupaten/ kota peduli HAM	105	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 dokumen	Menunjang
2.	Administrasi Umum	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	2 laporan	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 5 (lima) indikator kinerja program, dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.

Kegiatan ini menunjang Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada indikator kinerja persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan pada tahun 2022 telah berhasil menyusun 12 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta didukung pula Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

Pada tahun 2022 telah disusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 15 Raperda, yaitu :

Tabel 3.8.
Raperda Provinsi Jawa Tengah Yang Disusun

NO.	JUDUL RAPERDA
1.	Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman
2.	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT)
5.	Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah
6.	Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah
7.	Hak Penyandang Disabilitas
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah
9.	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah
10.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2052
11.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
12.	Penyelenggaraan Penyiaran
13.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
14.	Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)
15.	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbaas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Pada Tahun 2022 juga telah ditetapkan 13 (tiga belas) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.9.
Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
1	1 TAHUN 2022	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	18 April 2022	18 April 2022	Tahun 2022 Nomor 1	
2	2 TAHUN 2022	Pengarusutamaan Gender	18 April 2022	18 April 2022	Tahun 2022 Nomor 2	
3	3 TAHUN 2022	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	18 April 2022	18 April 2022	Tahun 2022 Nomor 3	
4	4 TAHUN 2022	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	18 April 2022	18 April 2022	Tahun 2022 Nomor 4	
5	5 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat	11 Juli 2022	11 Juli 2022	Tahun 2022 Nomor 5	Mengubah: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
		Daerah Provinsi Jawa Tengah				Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
6	6 Tahun 2022	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari	11 Juli 2022	11 Juli 2022	Tahun 2022 Nomor 6	Mencabut: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah
7	7 Tahun 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021	19 Agustus 2022	19 Agustus 2022	Tahun 2022 Nomor 7	
8	8 Tahun 2022	Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah	28 September 2022	28 September 2022	Tahun 2022 Nomor 8	
9	9 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	3 November 2022	3 November 2022	Tahun 2022 Nomor 9	
10	10 Tahun 2022	Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	16 November 2022	16 November 2022	Tahun 2022 Nomor 10	
11	11 Tahun 2022	Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Persero	6 Desember 2022	6 Desember 2022	Tahun 2022 Nomor 11	
12	12 Tahun 2022	Penyelenggaraan Penanaman Modal	22 Desember 2022	22 Desember 2022	Tahun 2022 Nomor 12	

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
13	13 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	30 Desember 2022	30 Desember 2022	Tahun 2022 Nomor 13	

Selain itu Biro Hukum pada tahun 2022 juga telah melakukan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan keadaan, dengan data hasil pengkajian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10.
Inventarisasi Pengkajian Produk Hukum Tahun 2022

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
25 Januari 2022					
1.	1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (Pajak Kendaraan Bermotor)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melakukan penyusuna Rancangan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dengan berpedoman kepada Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang substansinya terkait pemberlakuan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 masih berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0004026 tanggal 2 Maret 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011.	a. Telah masuk dalam Propemperda Tahun 2023 berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Proppgram Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; b. Telah disusun draf Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Telah dianggarkan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			terhitng sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (pada tanggal 5 Januari 2025).		
15 Februari 2022					
2.	2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017. (Pajak Non Kendaraan Bermotor)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dengan berpedoman kepada Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang substansinya meliputi: • Pengaturan untuk seluruh jenis Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 1 tahun 2022; • Pengaturan Jenis Pajak yang tidak dipungut dalam hal kajian potensi Pajak dinyatakan kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2022; • Pengaturan untuk seluruh jenis Pajak memuat Jenis Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak serta tarif pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022;	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0004026 tanggal 2 Maret 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011.	-idem-

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			• Pengaturan tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang meliputi PBBKB dan PAP serta Pajak Rokok (Pasal 85 UU UU Nomor 1 Tahun 2022); • Pengaturan Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan pajak retribusi (Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022); • Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi melalui pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah (Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022); • Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak (Pasal 103 UU Nomor 1 Tahun 2022); • Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak (Pasal 104 UU Nomor 1 Tahun 2022); • Pengaturan tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD (Pasal 102 UU Nomor 1 Tahun 2022);		
25 Maret 2021					
3.	3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk: a. Melakukan pendataan dan kajian potensi pendapatan jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0005646 tanggal 5 April 2021, perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah	a. Telah masuk dalam Propemperda Tahun 2023 berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; b. Telah disusun draf Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			Dan Pemerintah Daerah; b. Melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dalam satu (1) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dengan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; c. Melaksanakan inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dimaksud dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; serta d. Mengoordinasikan penyesuaian terhadap produk hukum daerah dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait lainnya.	Provinsi Jawa Tengah	oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Telah dianggarkan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dijadikan 1 (satu) dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, menindaklanjuti ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
20 April 2022					
4.	4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;	a. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur baru sebagai pengganti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 sesuai dengan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; b. Mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0008967 tanggal 3 Juni 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa	Akan diusulkan kedalam Propempergub Tahun 2023.

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
				Tengah Nomor 85 Tahun 2018.	
19 MEI 2021					
5.	5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk : a. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang substansinya mengatur pelaksanaan pengelolaan mineral dan batu bara yang didelegasikan termasuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. b. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri) serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait : 1) Substansi raperda pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022; 2) Potensi pendapatan dari sektor retribusi izin pertambangan rakyat dapat dipungut Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0008967 tanggal 3 Juni 2022 perihal Hasil Pengkajian Produk Hukum Daerah Terdampak Peratran Presiden Nomor 55 Tahun 2022.	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah: Draf Naskah Akademik dan Raperda sudah disiapkan dan akan diusulkan dalam Propemperda Tahun 2023 2. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah: Akan diusulkan dalam Propempergub Tahun 2023.
8 JUNI 2021					

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
6.	6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk : a. Menindaklanjuti penyesuaian Produk Hukum Daerah dimaksud sesuai dengan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; b. Mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/ 0011895 tanggal 22 Juni 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Di Sektor Pengelolaan Barang Milik Daerah.	a. Penyesuaian dilakukan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Rancangan Peraturan Gubernur akan disulkan masuk dalam Propempergub Tahun 2023.
7.	18 Juli 2022				
	7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk: a. Menyusun Raperda yang mengatur mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Menyusun Rapergub pencabutan beberapa produk hukum daerah berupa Pergub dan Kepgub sektor lingkungan hidup yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan; dan c. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0012912 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Telah ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap: a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Akan disusun draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang pencabutan beberapa Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sektor lingkungan hidup yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang akan dimasukkan dalam

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
	Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Labolatorium Lingkungan Pemerintah Dan Labolatorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah. 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah; 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah.				Propempergub Tahun 2023.
8.	3 Agustus 2022				
	14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk : a. Melakukan kajian secara teknis terkait mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dengan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0012515 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Hasil Pengkajian	Akan diusulkan pada Propemperda Tahun 2024.

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			berkoordinasi dengan Kementerian teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait. b. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru yang terintegrasi dengan pengaturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memperhatikan hasil pengkajian analisis dan evaluasi produk hukum daerah. c. Mengoordinasikan pelaksanaan dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012.	
9.	19 September 2022				
	15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk : a. Melakukan kajian secara teknis terkait pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kebijakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dengan berkoordinasi kepada Kementerian Teknis dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait; b. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur baru yang substansinya mengatur mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0016539 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Akan diusulkan pada Propemperda Tahun 2024.

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dapat terintegrasi dengan peraturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dengan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.		
10	24 s.d. 25 Oktober 2022				
	16. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk : a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; b. Dalam pelaksanaan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan pada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi yang dilaksanakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0018781 tanggal 21 November 2022 perihal Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020.	Naskah Akademik dan Raperda akan disusun pada Tahun 2023, dan diusulkan pada Propemperda Tahun 2024.

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir. c. Terhadap Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya, agar menyampaikan laporan secara tertulis terkait kajian kelembagaan kepada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyesuaian terhadap produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.		
11	November 2022				
	17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya	a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Jalan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sekaligus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/137 tanggal 8 Desember 2022 perihal Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016.	Naskah Akademik dan Raperda akan disusun pada Tahun 2023, dan diusulkan pada Propemperda Tahun 2024.

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			b. Terhadap penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman kepada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyesuaian Produk Hukum dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.		
12	Desember 2022				
	18. Pengkajian Penyusunan Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2022.	Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang mengatur: a. pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (Pasal 9); b. persyaratan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin (Pasal 17); c. persyaratan pemberian bantuan hukum untuk kelompok rentan (Pasal 21); d. tata cara pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin (pasal 25); e. tata cara pengajuan bantuan hukum untuk kelompok rentan (Pasal 29);	Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.0/158 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengkajian Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Yang Ditetapkan Pada Tahun 2022.	

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			f. pelaksanaan pelaporan pemberian bantuan hukum kepada Gubernur (Pasal 30 ayat (2)); g. jenis kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi (Pasal 36 ayat (3)); h. tugas dan alur koordinasi serta pembentukan tim jejaring sinergitas penyelenggaraan bantuan hukum (Pasal 39 ayat (3)); i. tata cara pemberian sanksi administratif terhadap pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar (Pasal 44 ayat (3));		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur: a. tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG (Pasal 8); b. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Pasal 37); c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender (Pasal 48);		
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah		

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat yang mengatur: a. mekanisme pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan ormas berbadan hukum (Pasal 17); b. fasilitasi ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan (Pasal 21); c. fasilitasi ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pasal 23); d. fasilitasi kerjasama ormas (Pasal 26); e. pelaporan kegiatan ormas (Pasal 33); f. kriteria penghar- gaan, tata cara pemberian penghargaan, dan pembentukan tim peniai (Pasal 41); g. tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap ormas (Pasal 46)		
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur: a. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (Pasal 11 ayat (5));		

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			b. pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak (Pasal 76 ayat (5)); c. pemberian penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 78 ayat (3)); d. pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak (Pasal 86); e. kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan KPAD (Pasal 93 ayat (4)); f. koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 97); g. sanksi administrasi pelanggaran peraturan daerah (Pasal 106);		
		Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur: pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Daerah (Pasal 7 ayat (3));		
		Biro Perekonomian	Tidak mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan		

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
		SETDA Provinsi Jawa Tengah	dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari.		
		1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 2. Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur: a. kelembagaan balai (Pasal 10 ayat (2)); b. penataan sumber daya manusia balai (Pasal 16); c. pemanfaatan prasarana dan sarana Balai (Pasal 23 ayat (2)); d. mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai (Pasal 26);		
		1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Yang mengatur:		

No	Produk Hukum Yang Dikaji	Perangkat Daerah Pengampu	Hasil Kajian	Out Put	Keterangan Tindak Lanjut
			a. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat (Pasal 18 ayat (2)); b. tata cara dan bentuk pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (Pasal 33 ayat (3)).		

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan untuk menunjang indikator kinerja program persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi, telah berhasil menyusun 12 dokumen fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan yang didukung melalui Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peran perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang diwujudkan dalam bentuk pengkajian rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.

- b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
- Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang indikator kinerja program persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani. Fasilitasi penanganan perkara di lembaga peradilan, fasilitasi penanganan perkara di Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan :
1. Agar permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan.

2. Supaya terwujud sinkronisasi dalam penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
3. Supaya terpenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

Pada indikator program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan dukungan Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum :

- a) Pelaksanaan fasilitas penanganan perkara dari target sebanyak 10 perkara dan telah difasilitasi penanganannya sejumlah 22 perkara yang terdiri dari perkara yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejumlah 13 perkara, perkara yang dicabut sejumlah 3 perkara dan perkara yang masih dalam proses persidangan sejumlah 7 perkara.

Tabel 3.11.
Fasilitas Penangan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2022

No.	Nomor Perkara	Pihak Tergugat	Keterangan
A. Perkara Lanjutan dari Tahun 2021			
1.	452/Pdt.G/2021/PN.Smg	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Banding/Inkracht
2.	55/Pdt.G/2021/PN.Sgr	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Kasasi/Inkracht
3.	51/Pdt.G/2021/PN.Dmk	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pertama/ Inkracht
4.	571/Pdt.G/2021/PN.Smg	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pertama/ Inkracht
B. Perkara Tahun 2022			
1.	1/Pdt.G/2022/PN.Bla	Gubernur Jawa Tengah	Banding/Inkracht
2.	2/G/TF/2022/PTUN.Smg	Gubernur Jawa Tengah	Tingkat Pertama/ Inkracht
3.	7/G/2022/PTUN.Smg	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pertama/Gugatan Dicabut

No.	Nomor Perkara	Pihak Tergugat	Keterangan
4.	1/Pdt.PK/2022/PN.Smg	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Peninjauan Kembali/Inkracht
5.	9/Pdt/G/2022/PN.Kbm	Gubernur Jawa Tengah	Banding/Inkracht
6.	10/G/2022/PTUN.Smg	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pertama/Inkracht
7.	11/G/2022/PTUN.Smg	Gubernur Jawa Tengah	Banding/Inkracht
8.	105/Pdt.G/2022/PN.Smg	Gubernur Jawa Tengah	Tingkat Pertama/Proses
9.	106/Pdt.G/2022/PN.Smg	Gubernur Jawa Tengah	Tingkat Pertama/Proses
10.	35/G/2022/PTUN.Smg	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Banding/Proses
11.	39/G/2022/PTUN.Smg	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Banding/Proses
12.	43/G/2022/PTUN.Smg	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pertama/Inkracht
13.	303/Pdt.G/2022/PN.Smg	Gubernur Jawa Tengah	Tingkat Pertama/Gugatan Dicabut
14.	46/Pdt.G/2022/PN.Pti	Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Banding/Inkracht
15.	56/G/2022/PTUN.Smg	Kelompok Kerja 2a Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	Tingkat Pertama/Proses

No.	Nomor Perkara	Pihak Tergugat	Keterangan
		Provinsi Jawa Tengah	
16.	065/SI/III/2022	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sidang Komisi Informasi/ Inkracht
17.	86/G/TF/2022/ PTUN.Smg	1. Gubernur Jawa Tengah. 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tingkat Pertama/ Proses
18.	63/Pdt.G/2022/PN.Pwd	Gubernur Jawa Tengah	Tingkat Pertama/ Proses

- b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pemerataan keadilan, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah melalui fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang berperkara di lembaga peradilan yang bekerjasama dengan 22 (dua puluh dua) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2022 telah ditangani 200 perkara yang terdiri dari 51 perkara pidana, 74 perkara perdata dan 75 perkara non litigasi.

Tabel 3.12.
Daftar Penanganan Perkara Oleh LBH di Jawa Tengah Yang Bekerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Nama LBH	Penanganan Perkara		
		Pidana	Perdata	Non Litigasi
1.	LKBH UNSIQ Wonosobo	9	-	-
2.	Aisyyah Jawa Tengah Surakarta	1	1	12
3.	YLBH Sultan Ageng Grobogan	-	6	7
4.	LBH Wahana Cilacap	1	2	4
5.	LKBH UMM Magelang	8	1	1
6.	POSBAKUMADIN Kudus	6	-	4
7.	LKBH Jepara	6	-	1
8.	YLBH Satria Grobogan	-	10	-
9.	PLBH Banjarnegara	3	1	12
10.	LBH Kamilia Demak	-	-	9

No.	Nama LBH	Penanganan Perkara		
		Pidana	Perdata	Non Litigasi
11.	YLBH Abdul Ghofur Jepara	-	12	4
12.	LPP Sekar Jepara	2	6	7
13.	YLBH Ratu Adil Semarang	4	-	3
14.	LBH Temanggung	-	8	-
15.	LBH PAHAM Surakarta	7	2	-
16.	LBH Perisai Kebenaran Purworejo	1	2	-
17.	Perkumpulan LKBH Sakti Purworejo	3	8	-
18.	LBH Surya Kusuma Demak	-	14	-
19.	LBH Kudus	-	1	11
20.	LPKBHI UIN Walisongo Semarang	-	-	-
21.	LBH Demak Raya	-	-	-
22.	YLBH Putra Nusantara Kendal	-	-	-
TOTAL		51	74	75

Catatan :
Terdapat 3 LBH selama tahun 2022 yang tidak melakukan penanganan pekara bagi masyarakat miskin.

Selaing Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum juga sebagai penunjang indikator kinerja program Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan melalui dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM. Pada tahun 2022 Biro Hukum telah melakukan fasilitasi penanganan sengketa aset, pelayanan aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang hukum dan HAM, dan melakukan pembinaan aksi peduli HAM kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah.

Tabel 3.13.
Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Tahun 2022

NO	NAMA OPD	LOKASI	SENGKETA DENGAN	KETERANGAN
1	RSUD Kelet	Kab. Jepara	Eks Penghuni RS Kusta	Selesai
2	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Kab. Batang	Masyarakat Penghuni	Selesai
3	RSUD Kelet	Kab. Jepara	Liposos	Selesai

NO	NAMA OPD	LOKASI	SENGKETA DENGAN	KETERANGAN
4	Dinas Sosial	Kab. Demak	Yunitasari	Proses
5	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Kab. Batang	Pecinta Merpati	Selesai
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kota Semarang	Warna Alam Indonesia	Proses
7	Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya	Kab. Blora (Cepu)	Kadang Pratno	Proses
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kota Semarang	Pengadaan Tanah	Proses
9	Pemkab Blora	Kab. Blora (Cepu)	Masyarakat Penghuni	Proses

Tabel 3.14.
Aduan Masyarakat Yang Difasilitasi Biro Hukum Tahun 2022

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
1	Masyarakat	Pemerintah, Desa Nolakerto	Pengrusuran Rumah yang ditempati 131 warga karena tanah kas desa yang dikelola warga tersebut akan dijadikan TPU	Warga tidak ingin ada pengrusuran	Pertanahan/ Perumahan	
2	Anonim - warga kelurahan Sampangan - Semarang	Masyarakat	Penghuni bangunan liar yang mengganggu karena premanisme	Lingkungan daerah tempat tinggal aman	keamanan lingkungan perumahan	
3	Saliyem	Masyarakat	Sengketa tanah (perdata) selama 4 tahun.	Penyelesaian sengketa tanah melalui Gubernur	Pertanahan/ Perumahan, Kepemilikan tanah	
4	Ruslan Effendy, SH., MH.	Kepala Biro Hukum	Mohon informasi mengenai hak tanah Ibu Suhartatik yang terletak di Kab. Pati	Ingin mengetahui isi surat Kepala Daerah Jawa Tengah Nomor 593.4/298/89/II Tahun 1989	Pertanahan	
5	Hanafi	Masyarakat	Penggelapan sertifikat miliknya, sudah lapor polisi tapi proses dihentikan	Membantu pengadu mengenai permasalahan tersebut	Hukum/ Peradilan dan Hak Asasi Manusia, Pidana	
6	Marlilik	Kepala Desa Hadiluwih, Sumber-lawang, Sragen	Mengurus persyaratan sertifikat hak atas tanah ke Kades, dokumen ada di Kades, sudah menanyakan ke Kades namun tidak ditanggapi	Agar permasalahan tersebut diselesaikan sehingga Pengadu dapat mengajukan pendaftaran atas tanah	Pertanahan/ Perumahan	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
7	Lanny Yulianti	Badan Hukum, Taspen Kebumen, Taspen Purwokerto, Taspen Pusat	Tabungan Taspen nominal tidak sesuai dengan perhitungan karena Pengadu merasa tidak pernah mengambil uang tersebut.	Diberikan informasi kenapa saldo yang terima tidak sesuai dengan jumlah perhitungan Pengadu, dan ingin haknya dikembalikan	Kepegawai-an/Ketenaga kerjaan, Tabungan Pensiun PNS	
8	Sri Rusmini	Masyarakat	Sengketa tanah warisan antar keluarga.	Ingin sengketa tanah tersebut terselesaikan	Pertanahan/ Perumahan	
9	Sri Arijani Cq Sudiyono dan Riyanti	Kepala Desa Keji dan Kades Pucungrejo, Kab. Magelang	Teradu belum mengesekusi hasil putusan inkracht PTUN	Agar putusan PTUN yang sudah inkracht dapat di eksekusi yaitu mengembalikan jabatan perangkat desa (para pengadu) sebagaimana semula	Hukum/Pera dilan dan Hak Asasi Manusia	
10	Sunardi dkk	Kepala Desa Nolakerto M.Nur Fathoni dan PemDes	Penggusuran 131 kapling yang telah ditempati warga desa Nolakerto	Musyawaharah terkait penggusuran/s engeketa tanah tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
11	Sugirin	Pemerintah Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap	Permasalahan Tanah terkait dengan kepemilikan tanah berdasarkan letter C desa yang diatasnya terdapat Puskesmas, Pasar, sekolah Dasar dan Rumah Dokter	Mohon Keadilan atas alas hak yang dimiliki Pengadu	Pertanahan	
12	Ristiastuti dkk	Masyarakat/ TNI	Sengketa tanah dan sudah menempuh upaya hukum hingga Banding yaitu mengabulkan permohonan Pengadu	Ingin audiensi dan meminta Gubernur untuk menerima pengaduan tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
13	Intan Nurcahyanti	Pemerintah, Kelurahan Tandang	Memiliki waris tanah di daerah Kel. Tandang, Tembalang. Ingin mengurus PBB namun pihak Kelurahan tidak memberi surat keterangan yang diperlukan untuk PBB tersebut.	Dapat mengurus pembayaran PBB	Pelayanan Masyarakat	
14	Dwi Juni Antoro	Pemerintah, Masyarakat, Pem.: BPN, dan warga	Kasus pidana pemalsuan sertifikat, sudah ada putusan, ingin pembatalan sertifikat ke BPN namun BPN justru mau mediasi dengan pihak lawan	Mohon solusi kepada Gubernur	Pertanahan/ Perumahan, Pidana	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
15	Sri Rahayu	Pemerintah, Kepolisian	Aduan mengenai salah tangkap oleh Kepolisian dan merasa dirugikan atas tuduhan dan sala tangkap tersebut	Meminta dibantu untuk dibebaskan atas tuduhan perampokan yang tidak pernah dilakukan	Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur, Hukum/Peralatan dan Hak Asasi Manusia	
16	Advokat&Konsultan Hukum Sadikin, SH., MH & Rekan	Pemkot Semarang Cq. BPKAD Kota Semarang Cq. Dinas Pertanian Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang telah menggunakan tanah darat milik alm. Usup bin Suro Sukiman berdasar letter c nomor 498 a.n. Alm Bp Usup Bins suro Sukiman.	Mohon mengusut penerbitan SHP nomor 1 tanggal 19 April Tahun 1985	Pertanahan/Aset Kota Semarang	
17	Pujianto & Mulyadi	PT. MAM Energindo	PT. MAM belum membayarkan kewajibannya sekitar 4,5 m kepada vendor	Bahwa karena belum dibayar, maka belum layak serah terima proyek (PHO)	Umum/Perdata hutang-piutang	
18	Yohanes Sonohardjo	Pemerintah	Adanya pembangunan Sarana Olah Raga di sekitar tanah pengadu	- menghentikan Pembangunan Sarana Olah Raga tersebut, meminta pihak tsb untuk mengajukan izin ke ombudsman	Pertanahan/Perumahan	
19	Bambang Wisan Besni	Pemerintah, Notaris dan Camat Toyogo	Adanya pungli untuk mengurus pemecahan sertifikat sawah dari notaris dan camat	Agar pungli tersebut ditindak	Pungutan Liar/Korupsi	
20	Kamil Yahya	Pemerintah	Terkait tanah kas desa yang disewa kemudian ada pemeriksaan inspektorat dan uang dari penyewa diminta dikembalikan	Agar inspektorat tidak terbang pilih dalam pemeriksaan	Pungutan Liar/Korupsi, (baru indikasi)	
21	LPPKNI	Masyarakat	Penundaan eksekusi putusan PN/Perdata	Penundaan pengosongan (eksekusi pengadilan)	Hukum/Peradilan dan Hak Asasi Manusia	
22	Edi Budi Santoso	Pemerintah	Terkait persoalan tanah/sengketa tanah dan sudah proses banding PT Semarang	Meminta proses banding dikaji, sesuai fakta dan bukti-bukti	Pertanahan/Perumahan	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
23	Subali/Warga Ruko Kanjengan	Pemerintah	Pemohonan kesediaan menjadi mediator antara warga kompleks Ruko Kajengan Dengan Walikota Semarang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait belum dilaksanakannya Putusan Perkara Nomor 193/Pdt.G/2010/PT. SMG Jo. No. 336/Pdt/2011/PT.SMG Jo. No. 850/K/Pdt/2012 Jo. No. 448/PK/Pdt/2014 Jo. No. 484/PK/Pdt/2017 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.2 Pdt.Eks/2014/PN.Smg tanggal 6 Oktober 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan korektif dari ORI	Gubernur Jateng menjadi mediator terkait permohonan tersebut diatas	Pertanahan/ Perumahan	
24	Joelijanto Widodo	Masyarakat	Pengadu merupakan pemenang lelang sebuah objek SHGB dan sudah membeli objek lelang tersebut sesuai prosedur. Namun pemilik lama objek tidak beritikad baik dan menguasai kembali objek lelang tersebut tanpa hak.	permohonan perlindungan hukum	Pertanahan/ Perumahan, Pidana	
25	Yudho Wardhoyo	Pemerintah (Kemenkumham Cq Rutan Demak)	Pengajuan asimilasi oleh Pengadu kepada Kemenkumham Jateng namun belum direspon karena adanya aduan dari pihak luar kepada pengadu sehingga pihak RUTAN Demak tidak dapat memberikan kebijakan proses asimilasi yang diajukan Pengadu	Membutuhkan bantuan dan adanya kepastian hukum terkait pengajuan asimilasi	Hukum/Peralihan dan Hak Asasi Manusia	
26	Satrio Windu Laksono	Pemerintah, (BPN Ungaran)	Pengurusan sertifikat tanah dari tahun 2008 hingga saat ini belum selesai di BPN Ungaran (objek di daerah Bandungan, Kab. Semarang)	Agar sertifikat tanah waris yang diurus dapat terbit	Pelayanan Masyarakat, Pertanahan/ Perumahan	
27	Toelle Cq Warga sekitar PLTU Batang	Badan Hukum, PT Bhimasena Power Indonesia	Tuntutan kesetaraan harga tanah dari PT BPI yang membeli tanah dari masyarakat untuk proyek PLTU Batang dan program mitigasi sesuai ijin lingkungan	Tuntutan kesetaraan harga tanah dari PT BPI yang membeli tanah dari masyarakat untuk proyek	Pertanahan/ Perumahan	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
				PLTU Batang dan program mitigasi sesuai ijin lingkungan		
28	Bupati Blora meneruskan aduan masyarakat Forum Perades Gagal	Pemerintah	Masyarakat menganggap ada kegagalan dalam CAT Calon Perangkat Desa di Blora	Meminta forensik ke BSSN CAT calon perades di Blora	Prosedur/ Tatalaksana/ Regulasi	
29	Purnomo Kantor Hukum/Warto Dikromo	Masyarakat	Sengketa tanah	Meminta verifikasi independen untuk masalah tanah milik warto dikromo tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
30	Yuliarti/Guyub (Kuasa Hukum)	Pemerintah, Dinas Pendidikan Kab. Kendal/SDN 3 Ngrancah, Sukorejo, Kendal	Belum ada kejelasan terkait ganti rugi tanah yang dipakai SDN 3 tersebut	Gubernur memberikan solusi percepatan ganti rugi tanah milik yang dikuasai dan ditempati SDN 2 Sukorejo	Pertanahan/ Perumahan	
31	Lusi Widayanti	Pemerintah: Kepolisian dan suami	Belum dilaksanakannya hasil sidang etik kepolisian oleh suami yang merupakan anggota polsek selogiri, wonogiri	Perlindungan hukum dari ancaman jaminan nafkah untuk anak dari suami	Pidana	
32	LBH Indonesia Menggugat	BUMN	Pencabutan Surat Kesepakatan antara Kabupaten Jepara dan PLN	Pencabutan Surat Kesepakatan antara Kabupaten Jepara dan PLN	Prosedur/Tat alaksana/Re gulasi	
33	Siti Khafidoh	Masyarakat	Istri purnawirawan POLRI yang tidak dinafkahi dan tidak bisa mengambil pensiun	Membantu kehidupan pelapor	Umum	
34	APRTN PD Jtg	Badan Hukum, PT. KAI	Surat perintah untuk mengosongkan rumah yang ditempati para pengadu karena merupakan aset PT. KAI yang tercatat dengan alas hak SHP 5/1988	Memohon perlindungan hukum terhadap upaya pengosongan tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
35	YLBHI Menggugat	Pemerintah, Badan Hukum	Terkait pengelolaan limbah PLTU yang berada di Jawa Tengah dan upaya	Audiensi TL penyelesaian limbah PLTU di Jawa Tengah serta	Lingkungan Hidup	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
			pengembangan pariwisata karimunjawa	pengembangan pariwisata		
36	Andreas T	Pemerintah, BPN	Pembuatan sertifikat di BPN Wonosobo yang tidak ada jalan keluar dan masalah pungli	Untuk pembuatan sertifikat	Pungutan Liar/Korupsi	
37	Edhi Setiawan	Pemerintah	Tidak bisa membayar pajak PBB karena objek PBB di Kota Semarang	Agar bisa membayar PBB karena merupakan pihak yang berhak atas objek PBB tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
38	Puput Mukri Handayani	Pemerintah	Tidak bisa membayar hutang bank, kemudian rumahnya mau dieksekusi		Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur, Pertanahan/ Perumahan	
39	Posbanku-madin Tegal	Masyarakat	Pemberitahuan surat teguran / somasi untuk kades karena membatalkan SKU	Melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa	Pelayanan Masyarakat, Prosedur/Tatalaksana/Regulasi	
40	PENI SULASTRI	PT.GARAM	Kepemilikan Tanah dan Bangunan Aset PT. Garam	Membeli Aset PT. GARAM	Pertanahan/ Perumahan	
41	K.Abdul Muchyi Mawardi	Pemerintah	Sanggahan surat dari BPKAD dan kepemilikan tanah	Gubernur memberikan solusi terkait sengketa hak atas tanah	Pertanahan/ Perumahan	
42	WALUYO	Badan Hukum	Permohonan penghapusan BDO	Permohonan penghapusan BDO	Umum	
43	Suripto	Masyarakat	Rumah dieksekusi	Dibantu untuk permasalahan eksekusi rumah	Pertanahan/ Perumahan	
44	Muhammad Nur	Masyarakat	Tindakan tidak transparansi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa	Perhitungan ulang	Prosedur/ Tatalaksana/ Regulasi	
45	Ainur Rofiq	Pemerintah	Pemberian patok di tanah bengkok	Pengukuran ulang	Pertanahan/ Perumahan	
46	Maula Fibrian Ariyandhi	Pemerintah, APH di Kab. Demak	Adanya arogansi, kriminalisasi, dan rekayasa hukum oknum-oknum pada Polres demak, kejar demak, hakim PN demak	Meminta perlindungan dan kepastian hukum, mengusut tuntas dan menindak tegas	Hukum/ Peradilan dan Hak Asasi Manusia	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
47	Nur Huda & Heni Sulistyowati	Badan Hukum, BRI	Tidak ada kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai debitur BRI Cab. Batang, karena mengalami bangkrut.	Permohonan keringanan pelunasan pinjaman	Umum, Perdata/ Pinjaman ke Bank	
48	Ahmad Sulthoni	Badan Hukum, Bank Mandiri, Regional retail VII Semarang	Masih ada itikad baik melunasi hutang pokok pada bank	Meminta penghapusan BDO, keringanan melunasi sisa hutang menunggu aset laku	Umum, perdata/pinjaman ke bank	
49	Gatot Murdjito	Masyarakat	Memberitahukan permohonan permohonan pembatalan SHM kepada Gubernur	Mohon petunjuk	Pertanahan/ Perumahan	
50	Lamisih Cs	Warga : Kades Glonggong, Parsini, Masroni, Widiarti, Didik Widiarto	Gugatan tanah hak milik dan kalah. Sudah ada putusan Tk. I dan Banding	Melaporkan persoalan tersebut kepada Gubernur dikarenakan kalah, namun meminta pihak teradu (tergugat) membayar kerugian atas tanah yang digunakan	Pertanahan/ Perumahan	
51	Muhammad Syifaun Naja	Pemerintah, Kepala Desa Jatimulyo, Demak	Sengketa mengenai pemberhentian sebagai perangkat desa, dan sudah diputus PTUN yakni batal demi hukum atas keputusan pemberhentian tersebut.	Mohon keadilan, kebijaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan Pemerintah Kabupaten Demak terutama Kepala Desa Jatimulyo, Demak.	Hukum/Pera dilan dan Hak Asasi Manusia	
52	Heriyawan	Badan Hukum, PT. KAI (BUMN)	Klarifikasi tanah SHM No. 2403 tahun 1989 an Lestari / Letter C 135 Persil 42 D I Luas sekitar 1510 m2 an Sastromihardjo alias Said yang dianggap tumpang tindih dengan SHP No. 3 an Menteri Perhubungan (sekarang menjadi aset PT.KAI DAOP 5 Purwokerto)	Mohon perlindungan hukum klarifikasi tanah SHM No. 2403 tahun 1989 atas nama Lestar dengan PT. KAI (Persero) DAOP 5 Purwokerto.	Pertanahan/ Perumahan	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
53	Muhammad Abdul Syukur	Pemerintah	Belum terlaksananya putusan eksekusi nomor 33/pdt.G/2014/PN.Slw jo 501/Pdt.2015/PT.Smg	Mengingatkan kewajiban para Tergugat untuk melaksanakan amar putusan	Hukum/Pera dilan dan Hak Asasi Manusia	
54	SAHID	Masyarakat	Masalah pertanahan antar warga	Fasilitasi penyelesaian	Pertanahan/ Perumahan	
55	Advokat Konsultan Hukum Andi Junianto & Partner	Pemerintah, Masyarakat	Somasi karena tidak adanya iktikad baik untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian	Hadir dalam undangan	Kepegawaia n/Ketenagak erjaan	
56	Himawan Sutanto	Badan Hukum, PDAM	Tanah digunakan sebagai jalan undak-undakan oleh PDAM Kab. Magelang tidak ada kompensasi	Dibantu terkait penyelesaian permasalahan tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
57	Siti Maslichah	Masyarakat	Sengketa waris dimana harta waris dikuasai oleh saudara/kakak kandung pertama, yang telah beralih kepemilikannya ke atas nama kakak kandung pertama tersebut melalui proses hibah yang diduga prosesnya cacat hukum.	Permohonan Bantuan Pemblokiran, Pembatalan, Pemecahan dan Pembagian Sertifikat Tanah Waris Almarhum ibu Sati SHM No. 922 dan SHM No. 1079 (rumah) di Desa Pasuruhan Lor RT 01 RW 09, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Prov. Jateng.	Pertanahan/ Perumahan, sengketa waris keluarga	
58	Walikhatul Fitriyah/Imron	Masyarakat	Pengadu mengalami musibah kecelakaan dan lawannya meninggal dunia. Atas hal itu diminta untuk memberikan kompensasi namun Pengadu tidak mampu secara finansial.	Meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.	Umum	
59	Ari Sulistiowati (Laporgub)	Pemerintah	Keberatan dengan harga Ganti Rugi Proyek Tol Bawen-Yogya	Meminta perlindungan dan bantuan terkait aduan.	Pertanahan/ Perumahan, ganti rugi proyek	
60	Tasni	Masyarakat	Sengketa hak atas tanah letter c dan Sertifikat	Meminta perlindungan hukum	Pertanahan/ Perumahan	
61	Slamet Darganto	Notaris	Proses balik nama di sertifikat yang lama sejak tahun 2018 di Notaris	Agar proses segera selesai	Pertanahan/ Perumahan, proses balik nama sertifikat di notaris	

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
62	Pangestu (Lawyer)	Pemerintah, Kantor Pertanahan/ BPN Kab. Pati	Pihak BPN tidak hadir untuk membawa warkah yang diminta untuk ditunjukkan di sidang.	Agar BPN dapat hadir dan menunjukkan warkah tanah yang sedang disidang di PN agar menjadi jelas status tanah tersebut.	Pertanahan/ Perumahan	
63	Pratiwi Widyani	Masyarakat	Sengketa tanah yang sudah diadili oleh PN Salatiga dan ada dugaan pemalsuan surat	Keadilan atas permasalahan tersebut	Pertanahan/ Perumahan	
64	Endar Susilo (Kantor Hukum)	Masyarakat, Nur Cahyati	Meminta penertiban bangunan liar berupa rumah makan Miroso di Jl. Semarang-Solo, diduga melakukan pelanggaran karena tidak berizin dalam memakai lahan untuk rumah makan.	Mengambil tindakan tegas dengan membongkar bangunan Rumah Makan tersebut.	Pertanahan/ Perumahan	
65	LBH Eddy Murdiyono	Pemerintah, Kepala Desa Temperak	Dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Temperak, Kec. Sarang, Kab. Rembang, yang melakukan sewa-menyewa tanah negara dan masuk rekening pribadi.	Menindaklanjuti secara administratif dan sanksi hukum yang diduga telah dilanggar Kepala Desa.	Pungutan Liar/Korupsi	
66	Marcellinus Iman Wahyudi	Badan Hukum, Developer Perumahan Malibou Residence, Pedurungan, Kota Semarang	Adanya wanprestasi pihak developer Perumahan Malibu, perumahan belum dibangun oleh developer sedangkan uang tanda jadi sudah masuk.	Memohon penyelesaian atas permasalahan rumah karena warga membutuhkan rumah.	Pertanahan/ Perumahan	
67	Wahyu Kurniawati	Badan Hukum, PT. IPU	Tumpang tindih kepemilikan tanah antara Pengadu dan PT. IPU	Meminta kejelasan tanah yang terkena dampak Sungai Kali Beringin di Mangkang Wetan, Kec. Tugu, Kota Semarang.	Pertanahan/ Perumahan	
68	Stefanus hendro/Dwi Juni Antoro					
69	Sadremi					

No.	Nama/Pihak Pelapor	Pihak Terlapor	Isi Aduan	Keinginan Pelapor	Kategori Aduan	Ket.
70	Susantyo Handoko					
71	Suyatno					

c. Selanjutnya Program Administrasi Umum dengan indikator kinerja program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum yang merupakan indikator penunjang indikator kinerja program utama yang ada di Biro Hukum, didukung oleh Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang pelaksanaannya didukung oleh Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatannya terfokus pada sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, diantaranya adalah :

- Sosialisasi pemberantasan cukai ilegal melalui pembuatan dan pemasangan iklan videotron, penyebaran iklan banner, spanduk, leaflet yang bertema "GEMPUR CUKAI ILEGAL".
- Sosialisasi Konsekuensi Hukum Penjualan Cukai Ilegal terhadap para Pengusaha dan Penjual.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui talkshow di radio.
- Pendampingan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum daerah provinsi di bidang DBHCHT.
- Pendampingan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Bidang DBHCHT.

Sedangkan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung oleh Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD merupakan kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum berupa kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan umum, kegiatan survey peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Biro Hukum, serta kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah Pusat dan Lembaga Teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 3.15.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.403.244.000	2.400.812.419	99,90
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1.488.244.000	1.486.154.719	99,86
	b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	915.000.000	914.657.700	99,96
2	Program Administrasi Umum	881.707.000	872.818.000	98,99
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.000	691.748.500	98,82
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.707.000	181.069.500	99,65

3.3 INOVASI

Biro Hukum pada tahun 2022 telah melakukan beberapa inovasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan layanan dan peran serta kepada masyarakat, aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah, antara lain :

- a. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah menjadi pusat layanan hukum yang terpadu dalam satu pintu untuk memudahkan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mengakses layanan bidang hukum.
- b. Pembuatan *New Branding* (Logo Baru) JDIH Provinsi Jawa Tengah dan menciptakan *tagline* “Ngayemi Lan Nglayani” yang bertujuan agar masyarakat, aparatur pemerintah dan lembaga lain semakin merasakan kemudahan dan kenyamanan atas layanan yang diberikan oleh Biro Hukum.
- c. Membangun “Satu Data Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah” sebagai upaya membantu kepada semua pihak dalam membutuhkan informasi produk-produk hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar semakin cepat, mudah, efektif dan efisien.

3.4 PENGHARGAAN

Sebagai wujud kinerja nyata pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Urusan-Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Biro Hukum pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah mendapatkan **"Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik 2 Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2022"**. Penghargaan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-2.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2022 yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Gambar 3.1.
Penerimaan Penghargaan Terbaik II JDIH Awards Tahun 2022



Pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-74 Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 dengan tema "Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang", Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai **"SEBAGAI PEMBINA 60% (ENAM PULUH PERSEN) ATAU LEBIH DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2021"** yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI kepada Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.2.
Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022



Gambar 3.3.
Piagam Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022



Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas peran dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Selanjutnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam P5HAM juga telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dan direalisasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Hukum, dan di tingkat Kabupaten/Kota melalui evaluasi dan pemantauan serta dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM setiap periode B04, B08 dan B12 dan pembinaan di tingkat provinsi akan dilanjutkan dengan penunjukan UPT Pelayanan Publik berbasis HAM sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya. Di level kabupaten kota akan ditingkatkan pemantauan koordinasi pelaksanaan P5HAM.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum pada tahun anggaran 2022 melebihi target yaitu capaian sebesar 105% dengan kategori **"Sangat Baik"**.

Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dengan alokasi anggaran Rp.2.403.244.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.400.812.419,- (99,90%). Program ini terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%; persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100% melebihi dari target 95%. Sedangkan Program Administrasi Umum sebagai program pendukung dengan alokasi anggaran Rp.881.707.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.872.818.000,- (98,99%).

Pencapaian yang melebihi target karena dengan telah menurunnya Pandemi COVID-19 maka terjadi peningkatan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota selain itu adanya aplikasi layanan E-PHD Provinsi Jawa Tengah, dan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah serta Pelita Jateng mempermudah pelaksanaan pengkajian, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien.

Disamping itu adanya beberapa keberhasilan dalam mendapatkan prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya :

1. Memperoleh penghargaan sebagai "Pembina 60% (Enam Puluh Persen) Atau Lebih Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2021".

2. Inovasi pengembangan aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) semakin mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah dan melakukan pengintegrasian dengan Aplikasi Tata Praja.
3. Pengembangan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (<https://jdih.jatengprov.go.id>) pusat layanan hukum terpadu dalam satu pintu.
4. Membangun Data Center Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin di Jawa Tengah yang dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Lembaga Peradilan agar terwujud adanya pemerataan dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

4.2. REKOMENDASI

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan pemerintah pusat yang baru sangat diperlukan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah.
2. Penanganan penyelesaian perkara memerlukan banyak kelengkapan alat bukti yang valid, namun saat ini sarana pelayanan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah masih kurang. Untuk itu perlu meningkatkan pembinaan dan koordinasi pada OPD agar melakukan tertib administrasi terhadap file-file penting, khususnya terkait dengan data Barang Milik Daerah. Selain itu agar mengoptimalkan fungsi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang merupakan pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.